

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Edisi Revisi)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Achwan, Harry Tjahjono dkk, 2001, *dikutip dalam Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana FHUI*, Jakarta.
- Amanita Novie, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, staffnew Universitas Negeri Yogyakarta.
- Andriansyah, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ansori, Abdul Gafur, 2006, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of gajah mada, Yogyakarta.
- Ashadie, Zaeni, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1999, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asikin Zainal, dkk, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pemburuan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Bentham, Jeremy, 2001, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, (Ontario: Batoche Books Kitchener)*

- Budiono, Abdul Rachmad Budiono, 1995, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Burhanuddin S, 2011, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Christiani, Anita, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Dahlan Siamat, 1995, “*Manajemen Lembaga Keuangan*”, Jakarta, Intermedia.
- Endro Purwoleksono Didik, 2006, *Hukum Pidana (cetakan pertama)*, Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP).
- F.X Djumialdji, F.X, dkk, 1985, *Perjanjian Perburuhan dan Perburuhan Pancasila*, Jakarta, Bina Angkasa.
- Gazali, Djoni S. dkk, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2007, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta Sinar Grfika.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hidayat Muharam, 2006, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksananya di Indonesia*, cetakan kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Husni Lalu, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ichsan Achmad, 1969, Ichsan, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.
- Imam Soepomo, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, cetakan ketujuh Jakarta: Djambatan.
- Imam Sudjono, 1999, *DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Financial Institution pensiun Fund*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Iman Sjahputra Tunggal, 1999, *Tanya Jawab Aspek Hukum Dana Pensiun di Indonesia*, Jakarta: Harvarindo.

- Jeremy Bentham, 2001, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener.
- Kartasapoetra, G. 1992, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafindo.
- Kertonegoro, Sentanoe, 1999, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit)*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Edisi Revisi)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) 1999, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXV. Jakarta: Pradnya Paramita.
- L.j Van Apeldoorn dalam *Shidarta, Moralitas 2006, Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, 2011, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bndung.
- Manulang, 1988, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Manullang E. fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta.
- Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-150/MEN/2000, Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan, cetakan kedua (Jakarta: Kepmenaker, 2000),
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hal. 8, dikutip dalam Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Muharam, Hidayat, 2006, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksananya di Indonesia*, cetakan kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi Lilik dkk, 2011, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*, PT.Alumni, Bandung.
- Muralidhar, A., 2011.”*Innovations in Pension Fund Management*, Stanford University Press, Stanford, Ca.
- Napitulu, Diana. R.W. Napitupulu, 2022, “*Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (Buku Materi Pelajaran)*” (Pusat Penerbitan Dan Percetakan Universitas Kristen Indonesia), Jakarta
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia: Jakarta.
- Novie Amanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, staffnew Universitas Negeri Yogyakarta, Bab 11.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2015, *Industri Keuangan non Bank Dana Pensiun*. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, “*Seri Literasi Keuangan Dana Pensiun*”, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014 dan Direktori 2015 *Industri Keuangan non Bank Dana Pensiun*. Jakarta. 2015
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1984, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Bandung.

- Uwiyono. A, 2006, *Refleksi Masalah Hukum Perburuhan Tahun 2005 dan Tren Hukum Perburuhan....*
- Purwoleksono, Didik Endro, 2006, *Hukum Pidana* (cetakan pertama), Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP).
- R. Setiawan, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- Rachmad Budiono, Abdul, 1995, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ridwan H R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ronal Yusuf dkk, 2022, *Kajian Grand Design Sistem Pensiun Nasional Dalam Rangka Penguatan Perlindungan Sosial di Hari Tua dan Akselerasi Akumulasi Sumber Dana Jangka Panjang*, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.
- Rudy Bahrudin, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-1, (Jogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 1997), hal. 4-5, dikutip dalam Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Rusli, Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- S. Gazali Djoni, dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sentanoe Kertonegoro, 1999, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit)*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Setiadi, A, 1995, *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung.
- Soebekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, cetakan kedelapan, Bogor: Intermasa.
Soebekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, cetakan kedelapan, Bogor: Intermasa.

- Soedjono, Wiwoho, 1983, *Hukum Pengantar Perjanjian Kerja*, cetakan pertama Jakarta: Bina Aksara.
- Soepomo, Imam, ... *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, cetakan ketujuh Jakarta: Djambatan.
- Sudjono, Imam, 1999, *DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Financial Institution pensiun Fund*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Keuangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triwulan, Titik dkk, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Tunggal, Iman Sjahputra, 1999, *Tanya Jawab Aspek Hukum Dana Pensiun di Indonesia*, Jakarta: Harvarindo.
- Wahab Zulaini, 2005, "*Segi Hukum Dana Pensiun*", Raja Grafindo Persada.
- Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wiwoho Soedjono, 1983, *Hukum Pengantar Perjanjian Kerja*, cetakan pertama Jakarta: Bina Aksara.
- Yunus, Shamad, 1995, *Hubungan Industrial di Indonesia*, Jakarta, PT Bina Sumberdaya Manusia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Undang-Undang Cipta Kerja No 2 Tahun 2022, Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.5/2015 Tentang Investasi dana Pensiun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692

Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Lembaga Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649

SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990, Tentang Lembaga Keuangan.

Peraturan Perusahaan PT Luxor Indonesia Tahun 2020

Jurnal

Alfitri, 2012, “*Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*”, Jurnal Konstitusi volume 9 nomor 3

Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, “Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?,” RUDN Journal of Law 24, no. 2 (2020): 438–71, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>.

Philip Schofield, “Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism,” Current Legal Problems 56, no. 1 (2003): 1–39, <https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1>

Ellyana Poerwaningsih, Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara antara Buruh dan Perusahaan Jurnal Vol 1, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia, 2019.

Nazhiva Anjani, Ummu Hilmy SH.MS, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H, Akibat Hukum Tidak Dieksekusianya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Jurnal Vol 7, 2017.

Mahmud Nuhung, dkk, ANALISIS MEKANISME DAN PENERAPAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013 PADA BANK SYARIAH CABANG TAMALANREA, Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam p-ISSN: 2684-7477 e-ISSN: 2714-6316 Vol.3 Nomor 2 Oktober 2020.

Agus Suprayogi, dkk, KAJIAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENTANG PERSELISIHAN HAK (STUDI KASUS PT. KARTIKA MITRA SEJAHTERA), Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009.

Dahlia dan Agatha Jumiati, PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN Undang-Undang NOMOR 2 TAHUN 2004, VOL.IX, 2 OKT.2011.

Undang-Undang Nuraini, SE, Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Sebagai Alternatif mempersiapkan masa pensiun, Edisi Mei 2003. Vol VIII NO. 2

Media

Brian Duignan, “Utilitarianism,” *Britannica*, <https://www.britannica.com/topic/utilitarianismphilosophy>

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>

- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5(2), 323–340. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.7339>
- H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *MMH*, 4(1), 50–58. <file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerah-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf>
- Harahap, Yahya, 2007, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta Sinar Grafika.
- <https://media.neliti.com/media/publications/23493-ID-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-berdasarkan-uu-nomor-2-tahun-2004.pdf>
- <https://www.jurnal.id/id/blog/lembaga-keuangan-bukan-bank/>
- https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/dana-pensiun/peraturan-pemerintah/Documents/ppdp3_1389349545.pdf
- Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, “Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?,” *RUDN Journal of Law* 24, no. 2 (2020): 438–71, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>.
- Philip Schofield, “Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism,” *Current Legal Problems* 56, no. 1 (2003): 1–39, <https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1>